JEJAK | *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*
Vol. 6, No. 1, Juni (2026) Hal. 17-30
E-ISSN: 2808-9111
DOI: 10.22437/jejak.v6i1.54450

Analisis Framing Pemberitaan Kompas tentang Reformasi Mei 1998 dan Dampaknya terhadap Jatuhnya Kepemimpinan Soeharto

Yustina Sri Ekwandari*[1], Aprilia Triaristina[2], Shabita Erliza[3]
[1*]yustina.sriekwandari@fkip.unila.ac.id
[1-3]Universitas Lampung

Informasi Artikel

Kata Kunci :
Kompas, framing, Reformasi 1998, opini publik, Soeharto, media, transisi politik.

Keywords:
Kompas, framing, Reformasi 1998, public opinion, Soeharto, media, political transition.

This is an open access article under the CC-BY license.

Copyright ©2026 by Author. Published by Universitas Jambi

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis framing pemberitaan Kompas selama Reformasi Mei 1998 dan dampaknya terhadap jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto. Menggunakan teori framing Robert M. Entman, penelitian menerapkan metode historis dengan studi dokumentasi terhadap dua edisi arsip Kompas edisi 13 Mei 1998 (pemberitaan insiden Trisakti) dan 16 Mei 1998 (pemberitaan dukungan transisi kepemimpinan). Analisis menunjukkan bahwa Kompas secara konsisten membingkai krisis sebagai kegagalan multidimensi pemerintah, menempatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai korban pelanggaran HAM, serta mendorong transisi kepemimpinan yang damai sebagai solusi. Melalui keempat elemen framing Entman defining problem, diagnosing causes, make moral judgment, dan treatment recommendation pemberitaan Kompas terbukti membentuk opini publik yang kritis terhadap rezim Orde Baru dan mempercepat delegitimasi Soeharto hingga pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998.

A B S T R A C T

This study analyzes the framing of Kompas newspaper coverage during the May 1998 Reformasi and its impact on the downfall of President Soeharto's leadership. Applying Robert M. Entman's framing theory, the research employs a historical method with documentary analysis of two primary Kompas archival editions May 13, 1998 (covering the Trisakti incident) and May 16, 1998 (covering elite support for a leadership transition). The analysis reveals that Kompas consistently framed the crisis as a multidimensional government failure, portrayed students and the public as victims of human rights violations, and promoted a peaceful leadership transition as the necessary solution. Through Entman's four framing functions defining problem, diagnosing causes, make moral judgment, and treatment recommendation. Kompas demonstrably shaped critical public opinion toward the New Order regime, ultimately contributing to Soeharto's resignation on May 21, 1998.

PENDAHULUAN

Periode Orde Baru tahun (1966–1998) di Indonesia dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan dan pembatasan kebebasan pers. Meskipun pada awalnya rezim Orde Baru ini berjanji untuk memberikan kebebasan berekspresi, kenyataannya, yang terjadi media berada di bawah kendali ketat oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan. Di bawah rezim orde baru, media dilarang menyampaikan informasi negatif atau kritis terhadap pemerintah. Media yang melanggar aturan ini, seperti Tempo, Detik, dan Editor, sering dibredel, misalnya pada tahun 1994, ketika ketiga media tersebut ditutup karena mengungkap pemberitaan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara (Haritajaya, 2017). Kebebasan pers pada masa Orde Baru lebih

berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan rezim, bukan sebagai sarana untuk mengontrol sosial dan menyebarkan informasi secara bebas. Pers memiliki peran yang sangat terbatas, meskipun secara normatif diakui dalam sistem hukum (Imron, 2016).

Pada tahun 1966, kebijakan tentang pers dimulai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXXII/MPRS/1966 yang mengatur pembinaan pers. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 disahkan sebagai dasar hukum yang mengatur ketentuan pokok pers di Indonesia, yang memberikan kebebasan pers dengan syarat setiap media memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Namun, kebebasan ini bersifat terbatas, karena pemerintah dapat memberikan tekanan besar terhadap media yang dianggap melawan pemerintah. Pada tahun 1982, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 semakin memperketat kontrol pemerintah atas media. Kebijakan ini diperparah dengan adanya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984, yang semakin membatasi kebebasan pers di Indonesia (Haghia et al., 2025).

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam peristiwa sejarah politik Indonesia dan kebebasan pers. Ketika krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia semakin memburuk, gerakan mahasiswa mulai mendapatkan momentum yang semakin kuat Mahasiswa menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penurunan harga barang-barang pokok, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada awal Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi, yang memuncak dengan peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menyebabkan banyak mahasiswa terluka, dan beberapa bahkan tewas. Peristiwa tersebut diikuti dengan kerusuhan 13 Mei 1998, yang semakin mengguncang pemerintahan Soeharto dan memperburuk citra Orde Baru di mata publik (Rustamana et al., 2023). Meskipun media berada di bawah pengawasan ketat, mereka terus menyuarakan tuntutan perubahan yang disuarakan oleh mahasiswa dan kelompok kelas menengah yang lelah dengan situasi yang ada.

Kompas, sebagai salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, memainkan peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Meskipun di bawah tekanan politik, Kompas tetap memberikan berita yang kritis yang membantu membentuk opini publik. Framing pemberitaan yang dilakukan oleh media sangat memengaruhi bagaimana publik memandang peristiwa-peristiwa besar tersebut. Framing adalah proses di mana media memilih, menekankan, dan menyajikan elemen-elemen tertentu dari suatu peristiwa untuk membentuk perspektif publik terhadap peristiwa tersebut (Siagian, 2024). Dalam pemberitaan mengenai Reformasi 1998, Kompas menggunakan framing untuk menekankan masalah korupsi, kolusi, nepotisme, serta demonstrasi mahasiswa, yang semakin memperburuk situasi politik Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh(Salman et al., 2023) yang menunjukkan bagaimana framing media mempengaruhi persepsi publik dalam merespons peristiwa besar seperti reformasi.

Framing yang dilakukan oleh Kompas sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat akan realitas politik Orde Baru yang sebelumnya tertutup. Media ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menggambarkan situasi krisis secara mendalam,

sehingga publik dapat memahami pentingnya perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan framing tertentu, Kompas memainkan peran yang sangat strategis dalam membangkitkan kesadaran publik terhadap pentingnya reformasi, yang akhirnya berkontribusi pada jatuhnya pemerintahan Soeharto (Salman et al., 2023) Menurut (Syafriadi, 2025) framing pemberitaan berperan besar dalam membentuk opini publik tentang krisis yang sedang terjadi, serta memberikan pandangan tentang arah perubahan yang perlu dilakukan dalam pemerintahan.

Dalam kajian komunikasi politik, analisis framing merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana media membentuk opini publik terhadap suatu peristiwa besar. Penelitian tentang framing pemberitaan Reformasi 1998 tidak hanya menunjukkan bagaimana media menggambarkan peristiwa tersebut, tetapi juga memberikan wawasan tentang dampak pemberitaan media terhadap persepsi masyarakat terhadap situasi politik yang terjadi. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana media massa dapat mendorong perubahan sosial dan politik dalam masyarakat, apalagi dalam konteks krisis politik seperti yang terjadi pada masa Reformasi (Putra, 2025). Secara keseluruhan, analisis framing pemberitaan Kompas mengenai Reformasi Mei 1998 memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara media, politik, dan publik. Kompas berperan sebagai agen perubahan dengan menggunakan framing yang kritis untuk membuka mata masyarakat terhadap masalah politik yang sedang terjadi, serta mengarahkan perhatian publik terhadap pentingnya transisi demokrasi di Indonesia.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan historis (historical research method), yang merupakan metode yang sangat relevan untuk menganalisis peristiwa sejarah, seperti peran media dalam Reformasi Mei 1998. Metode ini berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu menggunakan data atau peninggalan sejarah, yang mencakup dokumen, arsip, sumber lisan, serta bahan-bahan lain yang relevan. Menurut (Sumargono., 2021) pendekatan historis adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah penelitian dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang ada untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan ilmiah mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan terstruktur kejadian yang menjadi objek kajian, yaitu pemberitaan media mengenai Reformasi Mei 1998 dan dampaknya terhadap jatuhnya kepemimpinan Soeharto.

Metode penelitian sejarah dilakukan melalui beberapa tahapan yang jelas, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan awal yang berfokus pada identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian dokumen, arsip, buku, atau artikel media yang dapat memberikan informasi mengenai peristiwa yang sedang diteliti (Kuntowijoyo, 2005). Salah satu contoh sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip surat kabar Kompas yang memberitakan Reformasi Mei 1998. Kritik sumber adalah tahapan penting dalam menilai keaslian dan keandalan sumber yang ditemukan. Proses ini memastikan

bahwa data yang digunakan memiliki validitas yang tinggi dan relevansi terhadap objek penelitian. Kritik ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan dokumen, misalnya dengan memeriksa waktu dan tempat pembuatan dokumen serta kredibilitas sumbernya (Kuntowijoyo, 2005). Setelah proses kritik, peneliti melakukan interpretasi data, yang bertujuan untuk mengaitkan berbagai sumber sejarah dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi ini memfokuskan pada pemahaman hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam peristiwa sejarah, serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan budaya pada masa tersebut (Sjamsuddin, 1996).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi pustaka dan dokumentasi, di mana peneliti memanfaatkan sumber tertulis seperti artikel media, arsip surat kabar Kompas, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan topik kajian. Dalam proses ini, peneliti mencari sumber-sumber primer yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana media Kompas membingkai pemberitaan mengenai peristiwa Reformasi Mei 1998. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat visual atau media cetak yang berasal dari Kompas pada masa tersebut. Metode ini sesuai dengan prinsip penelitian sejarah yang menekankan pada analisis data sejarah secara kritis dan sistematis (Guba, E. G., & Lincoln, 1994).

Proses analisis data historis menekankan pada penafsiran yang cermat dan mendalam terhadap data sejarah yang ditemukan. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Kompas menyampaikan peristiwa penting tersebut melalui framing pemberitaan mereka. Framing pemberitaan oleh media bukan hanya sebatas pemilihan kata dan gambar, tetapi juga mencakup bagaimana aspek-aspek tertentu dari peristiwa disorot untuk membentuk persepsi publik (Salman et al., 2023) Dalam konteks Reformasi 1998, media berperan sebagai agen pembentuk opini yang menggugah kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah kritis yang terjadi pada masa tersebut, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melekat pada pemerintahan Soeharto. Dengan menggunakan pendekatan historis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran media dalam membentuk narasi sejarah, serta dampaknya terhadap opini publik pada periode Reformasi 1998, terutama dalam proses jatuhnya pemerintahan Soeharto(Salman et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pers Era Orde Baru

Periode Orde Baru di Indonesia (1966–1998) dicatat sebagai masa di mana kebebasan pers mengalami pembatasan sistematis melalui aturan dan praktik negara. Meskipun rezim Orde Baru memperkenalkan retorika keterbukaan dan stabilitas, kebijakan negara terhadap media massa bertujuan utama untuk menjaga status quo politik dan menghindari kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Selama periode ini, pers dipusatkan di bawah kontrol Departemen Penerangan yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi aliran informasi dan menetapkan batas-batas pemberitaan yang diperbolehkan pemerintah. Intervensi tersebut membuat media massa tidak bebas

menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan pernyataan yang dianggap menyinggung kekuasaan negara dapat berujung pada pembredelan atau pencabutan izin terbit media. Kasus paling signifikan adalah pembredelan majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor oleh pemerintah pada tahun 1994 sebagai respons terhadap pemberitaan yang menyinggung penyelewengan pejabat negara, yang mencerminkan pembatasan tegas terhadap ruang kebebasan pers pada masa itu. Pembredelan ini kemudian dipandang sebagai simbol tekanan politik terhadap media cetak di bawah rezim Orde Baru(Ariwianto, 2023).

Kajian ilmiah mengenai kebebasan pers pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa kontrol pemerintah terhadap media massa dijalankan melalui regulasi hukum yang ketat. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984, menjadi instrumen negara untuk mengatur media secara legal. Regulasi ini mewajibkan setiap media memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan memiliki ketentuan yang dapat dijadikan dasar pencabutan izin jika media dianggap melanggar batas-batas yang ditetapkan pemerintah. Regulasi formal tersebut memberikan dasar struktural bagi pemerintah untuk membatasi ruang kritik media dalam praktik pemberitaan sehari-hari (DN, 2000).

Pers memiliki peran penting sebagai institusi sosial yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan politik. Namun, selama era Orde Baru, peran ini dilemahkan oleh intervensi negara yang menempatkan media sebagai alat stabilisasi politik dan propaganda. Penelitian menunjukkan bahwa pembredelan, sensor, dan tekanan terhadap wartawan secara efektif mengecilkan kemampuan pers untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini terjadi karena informasi yang keluar dari media sering kali harus melalui proses evaluasi ketat oleh otoritas negara, sehingga independensi jurnalistik mengalami erosi. Seusai periode Orde Baru, kajian tentang dinamika kebebasan pers menekankan bahwa pembatasan (Putra, 2025) ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi praktik jurnalistik yang kritis dan transparan.

Pendekatan historis dalam penelitian juga menunjukkan bahwa pembatasan pers tidak hanya bersifat struktural tetapi juga bersifat sosiopolitik. Riset historis naratif tentang pers di era Orde Baru menjelaskan latar belakang polemik antara pemerintah dan media, seperti pembatasan setelah insiden Malari (1974) yang menggambarkan rezim berupaya menutup kritik publik melalui pengaturan ketat terhadap media. Pers yang berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial sering kali (Oktaviani et al., 2024) menghadapi tekanan tidak langsung berupa sensor, ancaman pencabutan izin, atau ancaman sanksi hukum yang membuat media enggan membahas isu-isu kontroversial secara terbuka

2. Media Massa Kompas Pada Era Orde Baru

Kompas merupakan salah satu surat kabar harian nasional yang paling berpengaruh di Indonesia sejak didirikan pada 28 Juni 1965. Selama rezim Orde Baru (1966–1998), pers Indonesia beroperasi dalam kondisi yang dikendalikan oleh negara melalui kebijakan legal

dan mekanisme birokratis. Kompas sebagai media besar tidak terlepas dari tekanan rezim tersebut dan berusaha menavigasi batas-batas kebebasan yang diizinkan sambil mempertahankan eksistensi jurnalistiknya (Wijayanto, 2024). Pada periode Orde Baru, pers berada di bawah pengawasan Departemen Penerangan yang mengatur konten media serta menetapkan kebijakan pembredelan terhadap outlet yang dianggap terlalu mengkritik pemerintah. Salah satu kasus yang sering dikutip sebagai simbol pembatasan kebebasan pers adalah pembredelan media seperti Tempo, Detik, dan Editor pada tahun 1994, ketika rezim mengambil langkah represif terhadap media yang memberitakan informasi kritis atau pemberitaan yang dinilai menyinggung pejabat negara. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa lingkungan pers pada masa Orde Baru bukanlah ruang yang bebas bagi media untuk bertindak sebagai pelapor independen tanpa risiko.

Dalam praktiknya, Kompas beroperasi dalam ruang publik yang dikendalikan oleh kekuasaan politik. Studi akademik menunjukkan bahwa media, termasuk Kompas, menghadapi dilema antara mempertahankan independensi jurnalistik dan menghindari sanksi politik yang dapat mengancam keberlanjutan organisasi media tersebut. Penelitian "*Polite Watchdog*" menjelaskan bahwa Kompas mengembangkan gaya jurnalistik tertentu yang disebut dengan "*polite watchdog journalism*" yaitu pemantauan terhadap tindakan kekuasaan yang dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu konflik langsung dengan rezim otoriter dan tetap menjaga hubungan dengan sumber kekuasaan yang memungkinkan kelangsungan operasi media dalam iklim represif (Wijayanto, 2024).

Kompas di Era Orde Baru sering kali menghindari kritik terbuka yang tajam terhadap pemerintah. Kompas tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh kebijakan media pemerintah, melakukan self-censorship dan penyesuaian konten untuk mengurangi risiko pembredelan atau pencabutan izin. Pendekatan semacam ini merupakan respons yang pragmatis terhadap situasi politik yang membatasi ruang kritis media. Secara historis, jumlah media yang beroperasi di Indonesia sebelum Reformasi relatif terbatas karena rezim mengontrol izin media dan konten pemberitaan (Asrun, 2025) Setelah era reformasi, jumlah media meningkat tajam sebagai konsekuensi berkurangnya kontrol negara terhadap pers. Walaupun Kompas menghadapi lingkungan yang dibatasi, peran pers sebagai institusi sosial kontrol tetap tidak sepenuhnya hilang. Media seperti Kompas berupaya menyampaikan informasi yang relevan kepada publik meskipun harus melalui mekanisme penyampaian yang hati-hati. Hal ini mencerminkan dinamika kompleks antara kontrol negara pada masa Orde Baru dan peran pers yang mencoba mempertahankan integritas editorial. Kompas tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan media Indonesia, baik dalam periode represif maupun transisi menuju kebebasan pers pasca-1998.

Lebih jauh, studi menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan pers pada masa Orde Baru memiliki dampak jangka panjang terhadap praktik jurnalistik di Indonesia. Meskipun era Reformasi membuka ruang baru bagi kebebasan media, struktur kontrol politik dan hubungan antara media dan kekuasaan belum sepenuhnya hilang karena interaksi sejarah dan ekonomi yang terus berpengaruh terhadap bagaimana media mengatur konten

pemberitaan mereka. Secara ringkas, Kompas selama Era Orde Baru bertindak dalam batasan yang ketat akibat kebijakan pemerintah yang mengontrol dan membatasi kritik media. Hubungan antara media dan rezim menunjukkan dinamika adaptasi yang kompleks, yang melibatkan aspek regulatif, editorial, serta strategi bertahan dalam iklim politik yang otoriter. Analisis Kompas dan peran pers di masa tersebut penting untuk memahami bagaimana media massa Indonesia berevolusi dari lingkungan yang terkontrol menjadi ruang publik yang relatif lebih bebas setelah Reformasi pasca-1998.

3. *Analisis Framing Kompas Berdasarkan Teori Robert M. Entman dalam Pemberitaan Peristiwa Mei 1998*

Teori framing menurut Entman menunjukkan bahwa media tidak netral; mereka memilih fakta tertentu untuk disorot dan disajikan, serta mengecilkan atau mengabaikan fakta lain untuk membentuk interpretasi publik tertentu. Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penekanan aspek realitas yang dipersepsikan melalui sebuah teks sehingga mendukung interpretasi tertentu tentang masalah, penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi (Robert M. Entman, 1993). Dalam kasus Reformasi Mei 1998, Kompas melalui pemberitaannya membentuk pemaknaan publik tentang peristiwa tersebut melalui framing yang menonjolkan konflik, korban, serta kebutuhan perubahan sistemik. Melalui dua headline yang dipilih berikut "Insiden di Universitas Trisakti Enam Mahasiswa Tewas" dan "Perwira Angkatan '45 dan PB NU Sambut Presiden 'Lengser Keprabon'" Kompas menerapkan keempat elemen teori Entman secara konsisten.

a. Insiden di Universitas Trisakti:

Insiden di Universitas Trisakti

Enam Mahasiswa Tewas

Jakarta, Kompas

Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5). Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol (Grogol fly-over). Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan.

Nama para korban adalah [illegible] Mulia Lesmana (Fakultas Arsitektur, angkatan 1996), Alan Mulyadi (Fakultas Ekonomi, angkatan 96), Hert Hertiyanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin, angkatan 93) luka tembak di punggung, Hendriawan (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, angkatan 96) luka tembak di pinggang, Von (Fakultas Ekonomi, angkatan 96), dan Hafidz Alifatin (Fakultas Teknik Sipil, angkatan 93) luka tembak di kepala.

Menurut rencana, jenazah akan disemayamkan di gedung rektorat Universitas Trisakti hari Rabu pukul 08.00 WIB ini, sementara tempat dan waktu pemakaman belum ditentukan.

Jumpa pers oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang sedianya akan diselenggarakan pukul 23.00 WIB di Markas Polda Metro Jaya, baru dimulai Rabu dinihari pukul 01.30 WIB, dan hadir pula Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata, Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi, dan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polda Metro Jaya Letkol (Pol) Edward Aritonang. Hingga berita ini diturunkan pukul 02.30, jumpa pers masih berlangsung.

Dalam jumpa pers itu hadir Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Moedanton Moertedjo yang mengatakan, enam mahasiswa tewas dalam insiden di Universitas Trisakti.

Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata menyatakan kepada wartawan, kematian enam mahasiswa itu masih diselidiki, sambil menunggu hasil visum et repertum. "Karena polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru karet, peluru hampa, dan gas air mata."

Ketua Crisis Centre Universitas Trisakti, Adi Andojo Soetjipto SH dalam jumpa pers, Selasa malam, mengumumkan, Universitas Trisakti akan mengajukan protes keras kepada pihak berwajib Museanya Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Menhankam/Pangab atas kejadian itu, dan akan melakukan konsultasi dengan Komisi Nasional

JUMPA PERS — Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Moedanton Moertedjo (13/5) didampingi sejumlah pejabat di Universitas Trisakti, di Markas Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya. Ia didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata. Dalam insiden itu, enam mahasiswa Trisakti tewas, puluhan lainnya luka-luka.

Ingin mengetahui tagihan kartuHALO bulan ini? Pakai fasilitas ANITA (Aneka Informasi Tagihan)! Caranya? Tekan 333 di ponsel Anda! BEBAS PULSA!

Gambar 1 Koran Harian Kompas 13 Mei1998
Sumber: Pusat Informasi Kompas
(Kompas, 1998b)

Defining Problem (Pendefinisian Masalah) Kompas menempatkan jatuhnya korban mahasiswa sebagai isu sentral pemberitaan. Fokus teks pada angka korban jiwa memberi bobot penting bahwa kejadian bukan hanya sekadar bentrokan, tetapi tragedi yang mengakibatkan kematian sivitas akademika. Ini sejalan dengan fungsi framing yang memilih fakta tertentu untuk disorot sehingga menciptakan "realitas sosial" khusus bagi

audien (Feby Jolanda Olivia1, 2023). *Diagnosing Causes* (Diagnosa Penyebab) Dalam narasi peristiwa, Kompas mengaitkan kejadian tersebut dengan tindakan represif aparat keamanan.

Penekanan pada pelibatan aparat menciptakan versi interpretasi yang menghubungkan penyebab tragedi dengan kebijakan represif rezim saat itu, yang selaras dengan kerangka Entman bahwa media memilih hubungan sebab-akibat yang dominan untuk dibawa ke pembaca (Khoerunisa, 2025). *Make Moral Judgment* (Penilaian Moral) Dengan menghadirkan pernyataan tokoh masyarakat seperti Adi Andojo Soetjipto yang mengecam tindakan aparat, Kompas membantu publik membentuk penilaian moral terhadap kejadian.

Media menawarkan sudut pandang yang menunjukkan tragedi ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi dan kewajaran, sehingga pembaca dipandu untuk melihat tindakan aparat sebagai tindakan yang perlu dikritisi secara moral. (Dhina Khoerunisa, 2024) . Penilaian moral seperti ini berfungsi memperkuat kerangka yang dipilih media dalam evaluasi kejadian. *Treatment Recommendation (Rekomendasi Solusi*) Kompas mengangkat rekomendasi yaitu investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban pihak berwenang. Ini sesuai dengan dimensi framing Entman yang menunjukkan bagaimana media tak hanya menyajikan masalah dan penyebab, tetapi juga menekankan solusi yang dianggap memadai. Rekomendasi ini menciptakan gambaran bahwa perubahan dalam menangani kebijakan keamanan dan perlindungan hak sipil diperlukan(Entman, 2010).

b. Perwira Angkatan ’45 dan PB NU Sambut Presiden “Lengser Keprabon

NO. 311 TAHUN KE-

Perwira Angkatan '45 dan PB NU

Sambut Presiden untuk "Lengser Keprabon"

Jakarta, Kompas

Perwira-perwira TNI-ABRI Angkatan 1945 dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menyambut baik dan menghargai berita di berbagai media massa tentang kesediaan Presiden Soeharto untuk *lengser keprabon* (turun tahta).

Sebab itu, dalam pernyataan tertulisnya, tertanggal 15 Mei 1998, yang ditandatangani 14 perwira tinggi TNI-ABRI Angkatan 1945, dinyatakan, "untuk merealisasikan keinginan itu perlu diselenggarakan Sidang Istimewa sesegera mungkin".

Ke-14 perwira tinggi Angkatan 1945 itu antara lain adalah Letjen TNI (Purn) A Kemal Idris, Letjen TNI (Purn) Ali Sadikin, Letjen TNI (Purn) Kharis Suhud, Laksda TNI (Purn) D Pardjaman, Letjen TNI (Purn) Sayidiman S, Letjen TNI (Purn) Himawan Soetanto, Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro, Prof Harun Zein - TRIP Jawa, Jenderal (Purn) Rudini, Letjen TNI (Purn) Solihin GP, Marsekal TNI (Purn) Ashadi Tjahjadi, Letjen TNI (Purn) Wijogo Atmodarminto, Marsekal TNI (Purn) Sukardi.

Sementara itu, PB NU menyebutkan, kesediaan *lengser keprabon* itu adalah wujud kearifan memahami aspirasi masyarakat yang disuarakan mahasiswa. Sudah menjadi tradisi dan tata nilai bangsa Indonesia bahwa kepentingan dan kemamatan rakyat, bangsa ... harus senantiasa didahulukan.

Hal itu dikemukakan Sekjen PB NU Achmad Bagja, didampingi Ketua Rozy Munir, dalam jumpa pers di Kantor PB NU, Jakarta, Jumat (15/5). Menurut Achmad Bagja, pernyataan PB NU telah dikonsultasikan kepada jajaran tertinggi PB NU, termasuk Rais Aam KH Ilyas Ruhiat, Katib Aam KH Drs M Dawam Anwar, dan Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid.

Mengenai pernyataan PB NU tentang kesediaan Presiden Soeharto untuk *lengser keprabon* menurut Achmad Bagja, tidak

(Bersambung ke hlm 7 kol 5-7)

Gambar 2 Koran Harian Kompas 16 Mei 1998
(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)
(Kompas, 1998a)

Defining Problem Headline ini membentuk pemahaman bahwa transisi kepemimpinan merupakan isu utama. Kompas menempatkan proses pergantian kekuasaan sebagai inti berita, menyorot dukungan dari kelompok militer senior dan organisasi masyarakat seperti PB NU terhadap keinginan mundurnya Presiden Soeharto. Format ini sesuai dengan dimensi Entman yang menekankan pada definisi masalah dari sudut

pandang berita (Khoerunisa, 2025). *Diagnosing Causes* Narasi penyebab krisis digambarkan sebagai hasil dari penumpukan tekanan sosial dan politik, terutama aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan ketidakpuasan publik terhadap rezim Orde Baru. Kompas menonjolkan konteks yang lebih luas daripada peristiwa individu, konsisten dengan teori framing yang memaknai penyebab sebagai aspek awal penting dalam membentuk pemahaman pembaca. *Make Moral Judgment* Penekanan Kompas pada pernyataan dukungan dari tokoh elit seperti perwira TNI-ABRI dan PB NU memberi legitimasi moral atas gerakan transisi kekuasaan damai. Media menggunakan sumber otoritatif untuk menunjukkan bahwa perubahan dipandang sah dan bernilai oleh aktor masyarakat yang besar, sehingga pembaca diarahkan untuk memandang proses reformasi sebagai langkah moral yang diperlukan. *Treatment Recommendation* Rekomendasi yang diangkat adalah transisi kekuasaan yang damai dan konstitusional untuk menghindari kekacauan. Itu menempatkan solusi yang diusulkan sebagai bentuk tanggapan atas krisis politik yang sedang berlangsung. Media, melalui framing ini, membantu publik melihat bagaimana stabilitas sosial dapat dipertahankan melalui pengakhiran kepemimpinan yang dianggap sudah tidak efektif lagi.

Dari dua contoh pemberitaan tersebut, terlihat bahwa Kompas menggunakan seleksi fakta dan penekanan tertentu yang konsisten dengan model Entman. Pemberitaan ini tidak hanya menyajikan kejadian, tetapi juga membangun interpretasi penyebab dan penilaian moral yang menekankan kebutuhan reformasi serta memberikan rekomendasi yang lugas kepada publik. Ini sejalan dengan penelitian framing dalam media massa lain yang menunjukkan bagaimana pemberitaan media dapat memengaruhi sudut pandang publik terhadap isu tertentu, khususnya dalam konteks konflik dan perubahan sosial.

4. Meningkatnya Tekanan terhadap Pemerintah Orde Baru

Media massa memainkan peran penting dalam proses pembentukan opini publik, terutama saat terjadi krisis politik dan aksi protes. Studi menunjukkan bahwa cara media memilih, menonjolkan, dan membingkai isu dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap aktor politik, penyebab masalah, serta solusi yang layak (JÖRG MATTHE, 2008). Secara spesifik, penyajian framing yang menekankan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan sosial sering kali menciptakan empati publik terhadap korban dan membentuk kritik terhadap pihak-pihak yang dipersepsikan sebagai pelaku ketidakadilan.

Dalam hal ini, media seperti Kompas mengarahkan pembaca untuk melihat mahasiswa dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan represif pemerintah, sementara tindakan aparat keamanan digambarkan sebagai pelanggaran moral yang semakin memperburuk legitimasi pemerintah Orde Baru. Pemberitaan Kompas dalam periode ini memperkuat framing bahwa krisis yang terjadi di Indonesia bukan hanya akibat kegagalan ekonomi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi rakyat, yang akhirnya memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade.

Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa media yang menyoroti ketidakadilan, seperti pelanggaran HAM atau aksi represif terhadap protes sosial, dapat memperkuat perhatian publik terhadap isu tersebut, dan mengarah pada perubahan dalam penafsiran mengenai penyebab dan tanggung jawab dari pemerintah.(Garg, 2021). Dalam pemberitaan Kompas, mahasiswa dan masyarakat umum digambarkan sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan represif, sementara tindakan aparat keamanan direpresentasikan sebagai bentuk pelanggaran moral yang memperburuk legitimasi pemerintah.

Selain itu, terdapat dimensi penting dalam framing ini yang melibatkan pilihan aspek-aspek tertentu dari peristiwa yang dibingkai oleh media. Kompas tidak hanya menyampaikan fakta-fakta terkait aksi protes mahasiswa, tetapi juga memilih untuk menekankan korban, ketidakadilan, serta reaksi sosial masyarakat terhadap rezim yang tengah berkuasa. Sejalan dengan konsep framing, media secara tidak langsung membentuk interpretasi dominan mengenai legitimasi pemerintah Orde Baru dengan menyoroti ketidakadilan dan peran aparat dalam pengendalian protes. Hal ini menunjukkan bagaimana media menafsirkan peristiwa sejarah dan secara aktif menegaskan makna sosial dari konflik yang terjadi untuk audiens mereka (Teresa, 2022).

Penekanan pada korban-korban mahasiswa yang jatuh dalam aksi protes tersebut secara tegas mengkonstruksi frame moral yang mengarah pada pemahaman bahwa pemerintah Orde Baru adalah pihak yang tidak sah lagi untuk memerintah, mengingat tindakan represif yang telah mereka lakukan. Secara keseluruhan, framing seperti ini berfungsi untuk menciptakan persepsi yang mengarah pada delegitimasi pemerintah di mata publik, yang pada gilirannya mendorong tuntutan reformasi yang semakin meluas di masyarakat.

Framing media dalam konteks ini juga tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi lebih pada manipulasi narasi sosial dan politik, yang menggiring opini publik untuk melihat peristiwa Reformasi 1998 sebagai sesuatu yang membutuhkan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan Indonesia. (Rahadi, 2017). Dengan cara ini, Kompas berperan sebagai media yang mendorong transisi sosial dan politik, tidak hanya dengan melaporkan peristiwa, tetapi dengan mengarahkan opini publik menuju pemahaman bahwa Reformasi adalah solusi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem yang rusak.

5. Opini Publik yang Menguatkan Jatuhnya Kepemimpinan Soeharto 1998

Pemberitaan media massa memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan opini publik, khususnya dalam periode krisis politik di mana legitimasi rezim dipertanyakan. Kompas sebagai salah satu media cetak nasional terkemuka di Indonesia secara intensif memberitakan berbagai masalah yang mencerminkan kegagalan pemerintah Orde Baru dalam mengelola negara, seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan gelombang protes mahasiswa yang meluas. Penelitian komunikasi politik menunjukkan bahwa media framing yakni cara media memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari berita dapat membentuk cara publik memahami suatu isu

politik dan bahkan mempengaruhi penilaian mereka terhadap aktor politik tertentu (Garg, 2021). Dalam konteks Reformasi 1998, Kompas mengangkat isu-isu tersebut dengan penekanan yang kuat pada ketidakmampuan pemerintah Orde Baru untuk merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Pemberitaan yang menekankan kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, serta ketidakmampuan aparat negara meredam protes mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, membentuk narasi yang mengarahkan publik untuk melihat rezim Orde Baru sebagai sebuah pemerintahan yang kehilangan kendali atas situasi nasional. Literatur tentang framing media dan protes sosial menunjukkan bahwa penonjolan korban, ketidakadilan, dan konflik sering kali berdampak pada persepsi publik sehingga mereka lebih kritis terhadap otoritas yang diberitakan(Teresa, 2022).

Penekanan Kompas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks penanganan demonstrasi mahasiswa seperti insiden di Universitas Trisakti yang menewaskan sejumlah mahasiswa menciptakan dukungan empatik di kalangan publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian framing yang menunjukkan bahwa ketika media menekankan pengalaman korban dalam pemberitaan protes, hal itu dapat meningkatkan identifikasi dan dukungan audiens terhadap gerakan protes serta kritik terhadap aparat atau pihak berkuasa(Brown, D. K., & Mourão, 2021). Dalam pemberitaan tersebut Kompas tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi melalui pilihan bahasa, ilustrasi, dan narasi, media menggambarkan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai pihak yang dirugikan oleh rezim. Pendekatan ini secara langsung mendorong pembaca untuk mempertanyakan kemampuan dan legitimasi pemerintah Orde Baru dalam melindungi hak sipil dan kesejahteraan publik.

Kerangka pemberitaan semacam itu mencerminkan fungsi media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang turut membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang suatu isu politik. Kajian lain tentang peran media dalam membentuk opini publik memperlihatkan bahwa pemberitaan yang tidak sekadar menyiarkan data, tetapi juga memberi penekanan pada nilai-nilai moral seperti keadilan, pelanggaran HAM, dan tanggung jawab pemerintah dapat menimbulkan tekanan publik yang lebih kuat terhadap pemerintah atau institusi yang diberitakan (Dharmajaya & Setiawan, 2026). Dampak dari framing ini adalah terbentuknya persepsi publik yang lebih kritis terhadap rezim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Ketidakpercayaan publik tidak hanya muncul dari satu isu, tetapi dari akumulasi pemberitaan yang menyoroti berbagai aspek kegagalan Orde Baru, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Pemberitaan intensif Kompas mengenai demonstrasi mahasiswa, pelanggaran HAM, dan ketidakmampuan pemerintah meredam aspirasi rakyat menciptakan gambaran krisis legitimasi nasional. Sejumlah studi framing meta-analisis menyimpulkan bahwa media framing terhadap gerakan protes memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi opini publik mengenai penyebab dan efek konflik politik dalam masyarakat(Teresa, 2022).

Lebih jauh, pemberitaan terus-menerus yang menekankan kegagalan rezim dalam menangani krisis memperkuat pandangan publik bahwa perubahan politik diperlukan. Ketika media memosisikan protes sebagai ekspresi sah dari ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang tidak responsif, itu juga menciptakan ruang interpretatif di mana publik melihat legitimasi rezim semakin terkikis. Dalam konteks politik, legitimasi merupakan landasan penting bagi keberlanjutan kekuasaan; apabila legitimasi tersebut runtuh, dukungan politik pun menyusut. Kerangka pemberitaan Kompas ini sejalan dengan literatur komunikasi

politik yang menunjukkan bahwa media dapat mengubah persepsi tentang legitimasi otoritas melalui repetisi naratif yang menekankan konflik, kegagalan, dan kebutuhan reformasi (Arman et al., 2025). Puncaknya, ketika tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat yang terekam dalam pemberitaan Kompas, opini publik yang kritis tersebut turut menjadi faktor yang mempercepat delegitimasi kepemimpinan Presiden Soeharto, yang kemudian berujung pada pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Kompas pun memberitakan peristiwa ini sebagai momen bersejarah sekaligus efek dari proses panjang delegitimasi yang berlangsung melalui penyebaran informasi yang terstruktur dan bernarasi tajam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kompas memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik selama krisis politik yang terjadi pada Mei 1998, yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Kompas, sebagai salah satu media utama di Indonesia, menggunakan teknik framing untuk mengarahkan persepsi publik terhadap krisis yang sedang terjadi. Teknik framing yang diterapkan oleh Kompas sejalan dengan teori Robert M. Entman, yang melibatkan empat fungsi utama: Defining Problem, Diagnosing Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation. Dalam defining problem, Kompas mendefinisikan masalah utama sebagai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ditambah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola situasi tersebut. Framing ini menggarisbawahi krisis multidimensi yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Diagnosing causes menyoroti penyebab dari kegagalan pemerintahan Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, serta kebijakan yang tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat. Melalui make moral judgment, Kompas secara eksplisit berpihak pada mahasiswa dan masyarakat sebagai korban ketidakadilan. Media ini mengkritik aparat yang menggunakan kekerasan terhadap demonstran dan memperkenalkan mereka sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, mahasiswa digambarkan sebagai aktor yang berjuang untuk demokratisasi, sementara pemerintah digambarkan sebagai pihak yang represif. Framing ini memperkuat narasi bahwa tindakan pemerintah Orde Baru tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dihargai oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam treatment recommendation, Kompas mendorong solusi berupa pergantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional, dengan fokus pada reformasi yang menyeluruh. Pemberitaan ini menyarankan bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus melakukan perubahan struktural yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan framing ini, Kompas tidak hanya melaporkan peristiwa yang terjadi, tetapi juga mengarahkan audiens untuk melihat situasi tersebut dalam konteks yang lebih luas. Framing yang menyoroti ketidakadilan dan korupsi, serta memperkuat perasaan empati terhadap korban, mengubah cara pandang publik terhadap pemerintah Orde Baru. Hal ini mengarah pada hilangnya legitimasi rezim Soeharto, yang sebelumnya telah bertahan selama lebih dari tiga dekade.Pemberitaan yang intensif mengenai demonstrasi mahasiswa, pelanggaran HAM, dan ketidakmampuan pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat mempercepat proses delegitimasi rezim Orde Baru.

Framing ini berkontribusi pada penurunan dukungan politik terhadap Soeharto, yang akhirnya mengarah pada pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Secara keseluruhan, pemberitaan Kompas memainkan peran penting dalam mempercepat transisi

politik di Indonesia. Melalui framing pemberitaan yang berfokus pada krisis sosial-politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan tuntutan perubahan, Kompas berhasil menjadi salah satu media yang mendorong reformasi politik di Indonesia dan membuka jalan bagi era Reformasi 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Ariwianto, E. (2023). Kebebasan pers serta kritik masyarakat dalam masa pemerintahan Orde Baru. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, *4*(2), 113–116.

Arman, Z. R., Ali, M., Uddin, J., Manik, D. I., & Hyder, U. (2025). *Manufacturing legitimacy: Media ownership and the framing of the July 2024 uprising in Bangladesh*. *1–16.*

Asrun, A. M. (2025). *Press freedom with press accountability: Indonesian experience*. *24*(1), 1–18. https://doi.org/10.1515/9789888842568-007

Brown, D. K., & Mourão, R. R. (2021). Protest coverage matters: How media framing and visual communication affects support for Black civil rights protests. *Mass Communication and Society, 24*(4), 576–596. https://doi.org/10.1080/15205436.2021.1884724

Dharmajaya, M. A., & Setiawan, A. (2026). *Media framing and public interpretation: A case study of news coverage of the relocation and development of the Indonesian capital*. *5*(01), 128–137.

DN, S. (2000). *kebebasan-pers-pasca-orde-baru.pdf* (pp. 221–242).

Entman, R. M. (2010). *Campaign 2008 of Campaign 2008*. https://doi.org/10.1177/1464884910367587

Olivia, F. J., & H. S. (2023). Analisis framing model Robert N. Entman tentang penerapan kembali tilang manual Jakarta di Kompas.com dan Tempo.com. *Jurnal Ilmiah WahanaPendidikan, 9*(9), 492–498. https://doi.org/10.5281/zenodo.7969063

Garg, G. (2021). Framing analysis of media coverage of protest movements: A systematic review of literature. *International Journal of Communication Development*, *12*(1–2), 10–26.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research*.

Haghia, R. S., Zuhdi, S., & Sunarti, L. (2025). *Building a fortress of independent journalism: Historical study of the role of Aliansi Jurnalis Independen (AJI) in Indonesia, 1994-1999*. *35*(1), 104–115.

Haritajaya, O. B. (2017). *"Pembredelan Pers di Masa Orde Baru, 1966-1998."*

Imron, I. (2016). Pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru dan relevansinya bagi mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah, 13*(1), 143–159.

Matthe, J. (2008). Studies in communication sciences. *Studies in Communication Sciences*, *8*.

Khoerunisa, D. (2025). Analisis framing model Robert N. Entman pada pemberitaan kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) di media online. *IKRAITH-HUMANIORA*, *13*(2), 187–204. https://doi.org/10.37817

Kompas, H. (1998a). Gambar 2 Koran Harian Kompas 16 Mei 1998. *Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*.

Kompas, H. (1998b). Koran Harian Kompas 13 Mei1998. *Sumber: Pusat Informasi Kompas*.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.

Oktaviani, A., & Martini, S. (2024). *Pers yang terbelenggu tahun 1974-1998*. *6*(1), 1–12.

Putra, N. M. (2025). *Kebebasan pers dalam transisi demokrasi: Studi kasus Indonesia*. *2*(1), 15–19.

Rahadi. (2017). Pembingkaian berita pada media lokal (analisis framing pemberitaan calon bupati Malang pada harian Radar Malang tanggal 1-7 Oktober 2015). *Sosial Politik Humaniora*.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Rustamana, H. A., Adillah, P. M., & Zatua, Z. (2023). *1998 reform movement*. *2*(6), 543–562.

Salman, D., Purwasito, A., & Rais, Wa. A. (2023). *How media remembered the past: Framing analysis of the May 1998 tragedy in Indonesian print newspapers (1999-2008)*. *39*(May 1998), 312–324.

Siagian, P. (2024). *Analisis framing dalam pemberitaan politik di tvonenews.com: Studi kasus pemilihan presiden 2024*. *2*.

Sjamsuddin, H. (1996). *Metodologi Sejarah.* Pendidikan Tenaga Akademik.

Sumargono. (2021). *Penelitian sejarah.* Leikesha.

Syafriadi, S. H. S. (2025). Press freedom and its relevance to the theory of people's sovereignty in the Indonesian legal regime. *PROPHETIC LAW REVIEW*, *7*(1), 47–69.

Teresa, G. C. (2022). *Effects of mass media framing of protest movements: A meta-analysis and systematic review of mass media studies*. *12*(2), 1–15.

Wijayanto. (2024). "Polite watchdog": Kompas and watchdog journalism in post-authoritarian Indonesia. *The International Journal of Press/Politics, 29*(3), 628-645.